

Pengaruh *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat: Suatu Persepsi dari Masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin

Della Yuni Arianti^{1*}, Deviani²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: della.yuniarianti@gmail.com

Tanggal Masuk:

14 Agustus 2023

Tanggal Revisi:

24 November 2023

Tanggal Diterima:

23 Desember 2023

Keywords: *Good*

Governance;

Accountability;

Transparency;

Responsiveness; Public

Trust.

How to cite (APA 6th style)

Arianti, D.Y., & Deviani (2024). Pengaruh *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat: Suatu Persepsi dari Masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (1), 17-28.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1143>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

This study aims to determine the effect of good governance (perceived accountability, perceived transparency, and perceived responsiveness) in the management of village funds in Pantai Cermin District on public trust. This type of research is causative with a quantitative approach. The population in this study was the people of Pantai Cermin District with a sample of people who were or had completed their education at tertiary institutions. Primary data in this study were collected by distributing a 5-point Likert scale questionnaire. SPSS software version 24 is used as a tool in processing research data and multiple linear regression analysis is used as a data analysis technique in this study. The results of the study show that perceptions of accountability have no partial effect on public trust; conversely, perceptions of transparency and responsiveness influence public trust. Simultaneously the three components of good governance affect the community's trust in the village government in Pantai Cermin District.

PENDAHULUAN

Dikeluarkannya UU No. 6 Tahun 2014 mengenai desa telah memberikan hak otonomi kepada desa. Dimana pemerintah desa memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa secara mandiri. Berdasarkan aturan tersebut, pada tahun 2015 dana desa mulai disalurkan ke setiap desa berdasarkan dengan jumlah populasi, tingkat kemiskinan, luas desa, dan tingkat kesulitan akses ke masing-masing desa. Pemerintah desa membutuhkan kepercayaan dari masyarakat dalam melakukan pengelolaan dana desa tersebut, karena dengan adanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan mendorong partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan desa (Sofyani & Tahar, 2021). Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah secara umum di pandang saling berhubungan erat dengan *good governance*, dimana kepercayaan masyarakat dapat meningkat apabila pemerintahan memenuhi aspek-aspek *good governance* dalam menjalankan tugasnya (Yousaf et al., 2016).

Menurut Popovski (2010) dalam Beshi & Kaur (2020) *good governance* merupakan kunci keberhasilan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat yang dibangun dengan kebijakan yang sehat. Sebagai dasar *good governance*, akuntabilitas, transparansi, dan *responsiveness* atau daya tanggap pemerintah merupakan syarat untuk memperkuat kepercayaan publik. Di tingkat desa penerapan praktik tata kelola yang baik penting untuk dilakukan, agar bisa memastikan pengelolaan dana desa dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembangunan desa (Sofyani & Tahar, 2021).

Sejak dana desa pertama kali dialokasikan pada tahun 2015, ada beberapa oknum pemerintah desa yang menyelewengkan dana desa demi keuntungan sendiri atau kelompok yang merugikan masyarakat. Bahkan, kasusnya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021 *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menemukan sektor anggaran dana desa merupakan sektor dengan kasus korupsi terbanyak, mencapai 154 kasus dengan jumlah kerugian senilai Rp 233 miliar. Kasus korupsi dana desa juga pernah terjadi di Kabupaten Solok, tepatnya di Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti pada tahun 2018 silam dengan total kerugian sekitar 800 juta rupiah. Hal-hal tersebut pada akhirnya membuat banyak masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah karena pemerintah yang kurang terbuka dalam pengelolaan keuangan tersebut, tak terkecuali di Kecamatan Pantai Cermin yang merupakan batas sebelah selatan dari Kecamatan Hiliran Gumanti.

Beberapa peneliti sebelumnya telah menunjukkan bahwa praktik *good governance* merupakan hal yang fundamental dan berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian Beshi & Kaur (2020), Mansoor (2021) dan Yousaf et al (2016) mengemukakan bahwa praktik transparansi, akuntabilitas dan daya tanggap pemerintah memiliki pengaruh secara positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini menunjukkan bahwa di tingkat pemerintah desa penerapan praktik *good governance* perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dana desa yang ada digunakan sebagaimana seharusnya dan bisa meminimalisir tindak kecurangan pengelolaan dana desa yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Di Indonesia penelitian serupa pernah dilakukan oleh (Apriliana, 2019; Nurriszkiana et al., 2017; Sofyani & Tahar, 2021; dan Pratolo et al., 2022) yang berfokus pada dua unsur *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi. Penelitian-penelitian tersebut menemukan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian Nurriszkiana et al. (2017) menemukan akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi secara positif tingkat kepercayaan *stakeholder*. Apriliana (2019) menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan masyarakat sedangkan transparansi tidak. Sofyani & Tahar (2021) sebaliknya mengungkapkan akuntabilitas tidak memiliki pengaruh pada kepercayaan masyarakat sedangkan transparansi memiliki pengaruh positif. Pratolo et al. (2022) mengungkapkan akuntabilitas dan transparansi memiliki hubungan negatif signifikan dengan kepercayaan masyarakat di masa pandemi.

Selain itu, penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia sebelumnya lebih difokuskan kepada bagaimana perspektif dari sisi pemerintah mengenai hal tersebut, sedangkan dari sisi masyarakat tidak begitu diperhatikan. Dalam penelitian yang dilakukan Imawan et al. (2019) menyarankan agar penelitian selanjutnya mendapatkan data yang lebih banyak terkait dengan akuntabilitas horizontal dengan cara memperbanyak informan atau responden dari sisi masyarakat. Lebih lanjut Imawan menyarankan agar peneliti selanjutnya melakukan pengumpulan data dengan cara penyebaran kuesioner kepada masyarakat.

Penelitian Beshi & Kaur (2020) mengenai pengaruh praktik *good governance* terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah yang dilakukan di Kota Bahir Dar dijadikan acuan dalam penelitian ini. Adapun unsur *good governance* yang diteliti terdiri dari akuntabilitas, transparansi, dan *responsiveness*. Penelitian ini penting dilakukan di Indonesia karena terdapat kekurangan penelitian dalam menyelidiki dampak dari ketiga unsur *good*

governance tersebut secara bersamaan dalam latar budaya Indonesia (Hartanto et al., 2021) Kebanyakan penelitian yang dilakukan di Indonesia hanya meneliti pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Beshi & Kaur (2020) yaitu tempat penelitian yang berbeda serta penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini. Teori legitimasi digunakan karena teori ini mengacu kepada upaya suatu entitas untuk mempertahankan kepercayaan dan dukungan masyarakat dengan cara memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintah yang baik, upaya untuk memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Hasil riset ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan teori legitimasi dengan menjelaskan bahwa tata kelola yang baik perlu dilaksanakan di tingkat desa sebagai strategi utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik.

REVIU LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi digunakan sebagai teori pendukung dalam penelitian ini. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975 . Menurut Deegan (2002) organisasi selalu berupaya memastikan kalau mereka beroperasi pada batasan serta norma-norma yang ada di masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, teori legitimasi berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan kebijakan yang dibuat. Legitimasi pemerintah didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap otoritas dan keabsahan pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Untuk dapat diterima dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, pemerintah harus mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan (Apriliana, 2019). Deegan (2019) mengargumentasikan teori legitimasi memiliki prinsip dasar bahwa organisasi yang sukses menuntut pemimpin untuk memastikan organisasi yang dijalankan sesuai dengan harapan masyarakat dan dengan cara itu dianggap sah. Ketika harapan masyarakat terhadap pemerintah terpenuhi, pemerintah desa dapat memperoleh kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat.

Good Governance

Tata kelola merupakan nilai-nilai dan tradisi dari lembaga di suatu otoritas dalam sebuah negara yang dilaksanakan berdasarkan proses pemilihan, pertanggungjawaban dan penggantian pemerintahan, penghormatan akan hak-hak warga negara, serta kapabilitas pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan (Yousaf et al., 2016). Tata kelola merupakan konsep yang luas dan beroperasi di setiap tingkatan pemerintah dan tata kelola pemerintah dapat dikatakan baik ketika mereka menanggapi masalah masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan harapan mereka dan dengan cara yang tepat (Yousaf et al., 2016). Tata kelola yang baik terdiri dari beberapa elemen, yang paling menonjol diantaranya yaitu akuntabilitas, transparansi dan *responsiveness* (Hartanto et al., 2021)

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban *agent* untuk memaparkan pertanggungjawabannya kepada *principal* (Mardiasmo, 2002). Dimana *agent* adalah pemerintah desa dan *principal* adalah masyarakat umum dan juga pemerintahan pada otoritas yang lebih tinggi. Jenis akuntabilitas yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa ada dua, yaitu akuntabilitas vertikal kepada pemerintah kabupaten/kota, dan akuntabilitas horizontal kepada masyarakat di desa tersebut. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai sejauh mana seseorang harus bertanggungjawab pada otoritas yang lebih tinggi atau publik atas setiap tindakan yang dilakukannya. Akuntabilitas dapat dijadikan dasar untuk mendapatkan

kepercayaan masyarakat, karena dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai kebijakan atau program yang mereka lakukan, dan memberi mereka akses terbuka untuk mengakses data mengenai sumber daya yang digunakan dapat memberikan persepsi bahwa pemerintah bertanggungjawab (Mansoor, 2021).

Transparansi menurut Nordiawan (2010) yaitu menyediakan akses yang terbuka mengenai informasi keuangan kepada masyarakat. Transparansi berkaitan dengan penyediaan informasi tentang proses keputusan utama, fungsi dan kinerja pemerintah (Mansoor, 2021). Akses informasi yang terbuka dari pemerintah mencerminkan transparansi dan menciptakan anggapan bahwa pemerintah bertindak sesuai aturan yang berlaku dan mengarah pada peningkatan kepercayaan publik (Mansoor, 2021). Selain itu dengan adanya transparansi juga bisa menjadi media untuk pemerintahan menjadi saling terbuka dengan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Beshi & Kaur, 2020).

Responsiveness berarti keyakinan bahwa pemerintah mendengarkan dan peduli tentang apa yang masyarakat katakan (Mansoor, 2021). Pemerintah perlu menunjukkan responsivitasnya dengan menjadi peka dan tanggap mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, sehingga dapat membangun kepercayaan (Nawawi, 2012). Tata kelola yang baik menganjurkan bahwa pemerintah harus menanggapi keprihatinan publik pada waktunya untuk membangun tata kelola yang baik (Mansoor, 2021)

Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mengacu pada keyakinan bahwa pemerintah melakukan hal yang benar untuk bertindak secara jujur atas nama publik (Beshi & Kaur, 2020). Kepercayaan pada pemerintah sangat diperlukan untuk berfungsinya pemerintah yang demokratis secara efektif. Kepercayaan publik kepada pemerintah merupakan hal yang penting karena ini membahas mengenai kualitas hubungan yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintahan mereka (Beshi & Kaur, 2020). Menurut Yousaf et al. (2016) untuk mendapatkan kepercayaan, pemerintah harus memerintah dengan lebih baik dengan cara lebih transparan, bertanggungjawab, akuntabel dan responsif dengan keterlibatan yang lebih aktif dengan publik dan khususnya penghormatan yang lebih tinggi terhadap hukum dan kepentingan publik.

Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2002) adalah kewajiban *agent* untuk memaparkan tanggungjawabannya kepada *principal*, yang memiliki hak untuk mengetahui hal tersebut. Akuntabilitas dapat menjadi peran penting dalam meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah (Yousaf et al., 2016). Deegan (2019) mengemukakan bahwa akuntabilitas berkaitan dengan upaya organisasi untuk mendapatkan kepercayaan publik dan status sah dengan menyampaikan informasi operasional yang sejalan dengan norma-norma yang berlaku, dan dengan cara itu pemerintah dapat memperoleh kepercayaan dan legitimasi atau pengakuan kekuasaan dari masyarakat. Penelitian (Beshi & Kaur, 2020; Yousaf et al., 2016; Hartanto et al., 2021; Apriliana, 2019; dan Nurrizkiana, 2017; Pamungkas et al., 2023) memperkuat pernyataan bahwa akuntabilitas secara positif berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Dari pembahasan di atas, hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H1 : Persepsi akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

Pengaruh Persepsi Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat

Transparansi menurut Nordiawan (2010) berarti menyediakan akses yang terbuka mengenai informasi keuangan kepada masyarakat. Ketika pemerintah menyediakan informasi

yang bisa di akses oleh masyarakat luas maka ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena masyarakat percaya bahwa pemerintah menjalankan kewajibannya berdasarkan aturan yang ada di masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membangun legitimasi di mata publik. Pengaruh transparansi terhadap kepercayaan publik dapat dijelaskan dengan teori legitimasi, dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memantau apakah pemerintah desa berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada (Deegan, 2019). Sehingga dengan dilakukannya transparansi diharapkan dapat mempengaruhi secara positif tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Penelitian (Sofyani & Tahar, 2021; Beshi & Kaur, 2020; Yousaf et al., 2016; dan Mansoor, 2021) memperkuat pernyataan bahwa transparansi memiliki pengaruh secara positif terhadap kepercayaan masyarakat. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka hipotesis kedua yaitu:

H2 : Persepsi transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

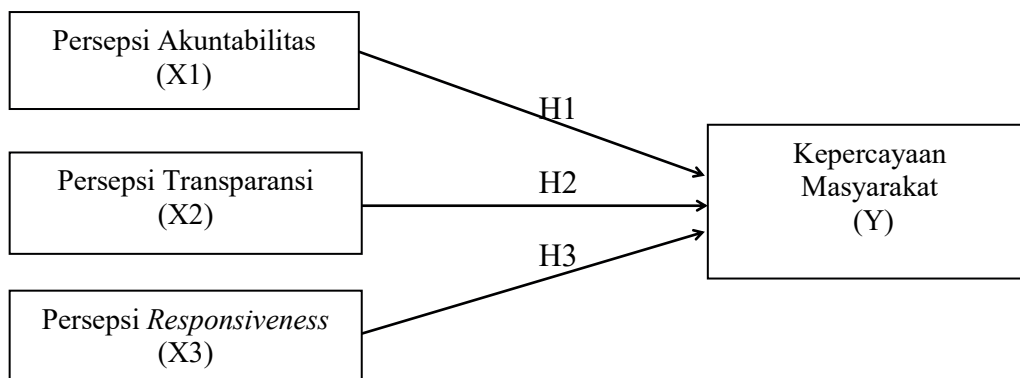
Pengaruh Persepsi *Responsiveness* terhadap Kepercayaan Masyarakat

Responsiveness berarti pemerintah responsif dan memiliki daya tanggap yang baik mengenai permasalahan atau keluhan yang terjadi di masyarakat untuk membuat masyarakat merasa yakin bahwa pemerintah dapat dipercaya. Persepsi *responsiveness* diukur dari kesediaan pemerintah untuk menanggapi permintaan dan keluhan masyarakat. Pemerintah yang tanggap terkait dengan perhatian, interaksi, dan penyediaan umpan balik yang efisien dan diukur dengan seberapa baik masyarakat merasakan bahwa pemerintah mendengarkan dan menanggapi kebutuhan mereka (Mansoor, 2021). Selain itu, daya tanggap juga penting karena kegagalan untuk memenuhi tuntutan atau masalah masyarakat tepat waktu dapat menyebabkan ketidakpastian dan kurangnya kepercayaan (Hartanto et al., 2021). Penelitian (Beshi & kaur, 2020; Hartanto et al., 2021; Yousaf et al., 2016; dan Mansoor, 2021) memperkuat pernyataan bahwa *responsiveness* berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat. Yang mengungkapkan bahwa dampak positif dari tanggapan yang dirasakan mengarah pada peningkatan kepercayaan warga negara terhadap lembaga dan perwakilan pemerintah. Dari pembahasan diatas, maka dirumuskan hipotesis ketiga yaitu:

H3 : Persepsi *responsiveness* berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

Kerangka Konseptual

Berikut adalah gambaran kerangka konseptual dari penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausatif, karena tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana variabel bebas memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Kepercayaan masyarakat merupakan variabel terikat, sedangkan *good governance* merupakan variabel bebas. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini menggunakan angka untuk dianalisis menggunakan perhitungan statistik (Sekaran, 2016). Data primer digunakan dalam penelitian ini dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner.

Populasi penelitian ini yaitu masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin. Sampel diambil dengan menggunakan kriteria tertentu (*purposive sampling*), kriterianya adalah masyarakat Kecamatan Pantai Cermin yang sedang atau telah menyelesaikan pendidikannya di bangku perguruan tinggi, dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. *Software* SPSS versi 24 digunakan sebagai alat bantu dalam pengolahan data penelitian. Untuk pengujian hipotesisnya menggunakan analisis regresi linear berganda.

Pengukuran Variabel

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diadopsi dari Beshi & Kaur (2020). Instrumen pada penelitian Beshi & Kaur (2020) ini sudah pernah diuji dan digunakan oleh peneliti terdahulu seperti Mansoor (2021), Hartanto (2022) dan Pratolo et al. (2022). Skala likert 5 poin digunakan dalam penilaian terhadap jawaban kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	2.64852544
Most Extreme Differences	Absolute	0.070
	Positive	0.032
	Negative	-0.070
Test Statistic		0.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2023

Dari Tabel 1 diketahui nilai sig 0,200. Ini menunjukkan bahwa data sudah terdistribusi secara normal. Karena data yang normal adalah jika nilai sig > α dengan ketentuan $\alpha = 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.935	1.599		3.710	0.000		
Persepsi Akuntabilitas	0.185	0.155	0.132	1.191	0.237	0.412	2.430
Persepsi Transparansi	0.316	0.141	0.269	2.242	0.027	0.352	2.837
Persepsi Responsiveness	0.348	0.094	0.390	3.707	0.000	0.460	2.175

a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat

Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2023

Dari hasil pengelolaan data pada tabel diatas diketahui bahwa variabel bebas dalam penelitian ini memiliki nilai *tolerance* diatas 0,352 dan VIF diatas 2,175. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian bebas gejala multikolinearitas. Karena pedoman suatu variabel terbebas dari multikolinearitas adalah jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 3
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	3.387	0.969		3.495	0.001	
Persepsi Akuntabilitas	0.059	0.094	0.097	0.627	0.532	
Persepsi Transparansi	-0.149	0.085	-0.293	-1.751	0.083	
Persepsi Responsiveness	0.001	0.057	0.002	0.011	0.991	

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2023

Uji glejser digunakan dalam penelitian ini untuk melihat apakah data mengalami gejala heterokedastisitas atau tidak. Jika nilai sig > 0,05 berarti data tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dari tabel hasil pengolahan data diatas diketahui bahwa nilai sig masing-masing variabel > 0,05 yang berarti tidak ada gejala heterokedastisitas dalam penelitian yang dilakukan.

Uji Hipotesis
Analisis Regresi Berganda

Tabel 4
Uji Regresi Berganda

		Coefficients^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.935	1.599		3.710	0.000
	Persepsi Akuntabilitas	0.185	0.155	0.132	1.191	0.237
	Persepsi Transparansi	0.316	0.141	0.269	2.242	0.027
	Persepsi <i>Responsiveness</i>	0.348	0.094	0.390	3.707	0.000

a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat

Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2023

Dari hasil pengolahan data pada Tabel 4, analisis model persamaan regresi linear berganda nya adalah:

$$Y = 5,935 + 0,185 X1 + 0,316 X2 + 0,348 X3 + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Kepercayaan Masyarakat

X1 = Persepsi Akuntabilitas

X2 = Persepsi Transparansi

X3 = Persepsi *Responsiveness*

Koefisien Determinasi

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.716 ^a	0.512	0.497	2.68959

a. Predictors: (Constant), Persepsi Responsiveness, Persepsi Akuntabilitas, Persepsi Transparansi

Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2023

Dari Tabel 5 diatas, didapatkan nilai *Adjusted R Square*-nya yaitu 0,497. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel persepsi akuntabilitas, persepsi transparansi dan persepsi *responsiveness* memiliki kontribusi terhadap variabel kepercayaan masyarakat sebesar 49,7%. Dan sisanya 50,3% ditentukan variabel lain diluar penelitian yang dilakukan.

Uji F

Tabel 6
Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	728.906	3	242.969	33.588	.000 ^b
	Residual	694.454	96	7.234		
	Total	1423.360	99			

a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat

b. Predictors: (Constant), Persepsi Responsiveness, Persepsi Akuntabilitas, Persepsi Transparansi

Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengelolaan statistik diatas menunjukkan nilai F_{hitung} -nya 33,588 dan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $33,588 > 2,699$ (sig 0,000 < 0,05). Ini dapat diartikan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat sebesar 33,588%

Uji t

Tabel 7
Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	5.935	1.599		3.710	0.000
	Persepsi Akuntabilitas	0.185	0.155	0.132	1.191	0.237
	Persepsi Transparansi	0.316	0.141	0.269	2.242	0.027
	Persepsi Responsiveness	0.348	0.094	0.390	3.707	0.000

a. Dependent Variable: Kepercayaan Masyarakat

Sumber: Data primer yang sudah diolah, 2023

Dari Tabel 7 diatas dapat dianalisis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah adalah sebagai berikut:

Pengaruh Persepsi Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Masyarakat

Dari tabel 7 diketahui bahwa variabel persepsi akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Karena nilai signifikansi (sig) persepsi akuntabilitas $0,237 > 0,05$ dengan t_{hitung} sebesar $1,191 < t_{tabel}$ 1,661, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa **H1 ditolak**. Ini memiliki arti bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh secara positif terhadap kepercayaan masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin. Deegan (2019) mengemukakan bahwa akuntabilitas berkaitan dengan upaya organisasi untuk mendapatkan kepercayaan publik dengan menyampaikan informasi operasional yang sejalan dengan norma-norma yang berlaku. Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa akuntabilitas dari pihak pemerintah desa tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat, menurut Sofyani & Tahar (2021) kepercayaan masyarakat kepada pemerintah tidak terpengaruh oleh

akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa jika masyarakat tidak merasakan perubahan positif atau manfaat dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.

Hasil yang sama ditemukan oleh penelitian Sofyani & Tahar (2021) dan Pratolo et al. (2022). Di Kecamatan Pantai Cermin akuntabilitas dari pihak pemerintah desa tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat, dikarenakan akuntabilitas yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa tidak diikuti dengan transparansi. Ketika pemerintah akuntabel namun jika tidak diikuti dengan transparansi maka hal ini tidak mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Selain itu masyarakat juga peduli dengan kebermanfaatan dana desa yang mereka rasakan, tidak hanya kepada bagaimana dana desa tersebut dikelola. Kepercayaan masyarakat bisa tumbuh jika pemerintahan desa di Kecamatan Pantai Cermin melaksanakan akuntabilitas yang diikuti dengan transparansi dan disertai dengan bukti nyata kepada masyarakat mengenai kegunaan dana desa dan manfaatnya bagi masyarakat.

Pengaruh Persepsi Transparansi terhadap Kepercayaan Masyarakat

Dari tabel 7 diketahui nilai signifikansi (sig) variabel persepsi transparansi $0,027 < 0,05$ dengan $t_{hitung} 2,242 > \text{nilai } t_{tabel} 1,661$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa **H2 diterima**. Ini dapat diartikan bahwa transparansi memiliki pengaruh secara positif terhadap kepercayaan masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi transparansi pemerintah desa maka kepercayaan masyarakat akan ikut meningkat. Menurut Deegan (2019) pemerintah bisa mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan melakukan transparansi dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan transparansi dalam memutuskan sesuatu.

Hasil yang sama dilakukan oleh (Beshi & Kaur, 2020; Mansoor, 2022; Sofyani & Tahar, 2021; dan Nurrizkiana, 2020). Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Pantai Cermin praktik transparansi pengelolaan dana desa penting untuk dilakukan. Karena masyarakat perlu mengetahui dana desa dialokasikan kemana dan untuk apa, agar masyarakat bisa memutuskan sikap untuk memilih percaya atau tidak terhadap pemerintah. Apabila pemerintah tidak membuka secara jelas apa yang mereka lakukan terhadap masyarakat, maka ini dapat menimbulkan asumsi atau prasangka negatif dari masyarakat yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pengaruh Persepsi *Responsiveness* terhadap Kepercayaan Masyarakat

Berdasarkan tabel hasil pengelolaan data diatas didapat nilai signifikansi (sig) variabel persepsi *responsiveness* yaitu $0,000 < 0,05$ dengan $t_{hitung} 3,707 > \text{nilai } t_{tabel} 1,661$, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa **H3 diterima**. Ini memiliki arti bahwa persepsi *responsiveness* memiliki pengaruh secara positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa semakin responsif pemerintah desa, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga akan ikut meningkat. Dalam teori legitimasi pemerintah yang responsif cenderung lebih mampu memenuhi harapan masyarakat dan memperoleh dukungan dari masyarakat, selain itu dengan memenuhi harapan masyarakat, pemerintah desa dapat memperoleh kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat (Deegan, 2019).

Hasil ini didukung oleh penelitian (Beshi & Kaur, 2020 ; Mansoor, 2021 ; dan Hartanto, 2022) yang mengemukakan bahwa daya tanggap pemerintah merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hubungan yang positif dari tanggapan yang dirasakan dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di Kecamatan Pantai Cermin menunjukkan pentingnya ketanggapan pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa perwakilan pemerintah desa perlu menangani masalah masyarakat secara responsif dan tepat waktu untuk

membuat masyarakat merasa bahwa pemerintah peduli terhadap mereka dan mereka menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan pemerintah.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah *good governance* (persepsi akuntabilitas, persepsi transparansi, dan persepsi *responsiveness*) dalam pengelolaan dana desa mempengaruhi secara positif tingkat kepercayaan masyarakat di Kecamatan Pantai Cermin. Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: Hipotesis pertama ditolak, ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dari pihak pemerintah desa tidak meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa di Kecamatan Pantai Cermin. Hipotesis kedua diterima, ini menunjukkan bahwa semakin transparan pemerintah desa di Kecamatan Pantai Cermin, maka kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. Hipotesis ketiga diterima, hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin peduli dan semakin peka pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa di Kecamatan Pantai Cermin juga akan semakin meningkat.

Keterbatasan

Penelitian ini hanya berlokasi di satu kecamatan saja yaitu Kecamatan Pantai Cermin, sehingga hasil penelitian belum dapat di generalisasi secara keseluruhan. Penelitian ini hanya meneliti tiga aspek *good governance*, sehingga tidak bisa menggambarkan secara menyeluruh dan lebih mendalam mengenai pengaruh *good governance* terhadap kepercayaan masyarakat.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Hal yang dapat disarankan untuk peneliti yang akan melakukan riset dengan topik yang sama yaitu untuk menambah luas wilayah cakupan penelitian serta peneliti selanjutnya bisa meneliti variabel-variabel lain dari aspek *good governance* dan melihat pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat. penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Sebaiknya, peneliti selanjutnya dapat menerapkan metode campuran dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menemukan mekanisme lain yang terlibat dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana, I. (2019). Determinants of accountability and transparency of village fund allocation management and its impact on community trust. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 109–122. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i2.18>
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public trust in local government: Explaining the role of good governance practices. *Public Organization Review*, 20(2), 337–350. <https://doi.org/10.1007/s11115-019-00444-6>
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures—a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 15(3), 282–311. <https://doi.org/10.1108/09513570210435852>
- Deegan, C. M. (2019). Legitimacy theory: Despite its enduring popularity and contribution, time is right for a necessary makeover. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 32(8), 2307–2329.

- Grimmelikhuijsen, S. (2012). Linking transparency, knowledge and citizen trust in government: An experiment. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 50–73. <https://doi.org/10.1177/0020852311429667>
- Hartanto, D., Dalle, J., Akrim, A., & Anisah, H.U. (2021). Perceived effectiveness of e-governance as an underlying mechanism between good governance and public trust: a case of Indonesia. *Digital Policy, Regulation And Governance*, 23(6), 598-616.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias Y.W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 156-175.
- Mansoor, M. (2021) Citizens's trust in government as a function of good governance and government agency's provision of quality information on social media during COVID-19. *Government Information Quarterly*. 38(4). <http://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101597>
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI
- Nawawi, J. (2012). Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. 1(3), 19-29.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. (2010). *Edisi 2 Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinants of Transparency and Accountability of Regional Financial Management and Its Implications to Trust of Public-Stakeholders. *Journal of Accounting and Investment*, 18(1), 28-47.
- Pamungkas, B., Helmayunita, N., & Honesty, F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Conflict of Interest dan Komitmen Organisasi terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic COVID-19. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(1), 84-97. <https://doi.org/10.24036/jnka.v1i1.1>
- Park, H., & Blenkinsopp, J. (2011). The roles of transparency and trust in the relationship between corruption and citizen satisfaction. *International Review of Administrative Sciences*, 77(2), 254–274.
- Pratolo, S., Sofyani, H., & Maulidini, R.W. (2022).) The roles of accountability and transparency on public trust in the village governments: The intervening role of COVID-19 handling services quality, *Cogent Business & Management*, 9(1), <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2110648>
- Said, J., Aziz, M.A., Alam, M. (2015) Public Accountability System: Empirical Assesment of Public Sector of Malaysia, *Asian Journal of Scientific Research*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Methods For Business: A Skill Building Approach. Fourth Edition*. United Kingdom; John Wiley & Sons Ltd
- Sofyani, H, & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10-25.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Vigoda, E., & Yuval, F. (2003). Managerial quality, administrative performance and trust in governance revisited: A follow-up study of causality. *The International Journal of Public Sector Management*.,16(7), 502–522. <https://doi.org/10.1108/09513550310500382>.
- Yousaf, M., et al. (2016) Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan, *Government Information Quarterly*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2015.06.001>